



IDENTIFIKASI PROBLEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENJAGA KONSISTENSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SEMANGAT OTONOMI (STUDI KABUPATEN PULANG PISAU)

Charles Hutapea
Universitas Palangka Raya
Email: (charles.hutapea90@fisip.upr.ac.id)

Article Info

Keywords:

*Development Planning,
Regional Autonomy, Local
Government*

Recived 23/05/2022

Accepted 06/06/2022

Available online 07/07/2022

Abstract

Regional autonomy is the spirit of regional autonomy which has the aim of increasing the potential of regions in Indonesia and increasing regional development. Development planning is a process of formulating alternatives or decisions based on data and facts that will be used as material for carrying out a series of activities/activities. This study uses descriptive qualitative research methods, processing descriptive data, such as interviews and field observations. The purpose of this study is to identify and identify development planning problems in Pulang Pisau district, which is to maintain the consistency of local government in the spirit of regional autonomy. The current condition of improving the quality of planning implementation has not been significantly followed by an increase in the quality of planning products. This is due to several main challenges and problems, namely the not yet optimal coordination of regional development planning; and synchronization of processes, less than optimal community participation. Weak competence of planning personnel in SKPD. The provision and management of accurate development data is not yet optimal. Not yet optimal utilization of planning documents, Not yet optimal implementation of monitoring and evaluation of development programs associated with planning documents. The implementation of planning, control and use of space has not been optimal yet and the lack of supporting documents regarding. There is no synchronization of the planning documents prepared by the regional government and the private sector or other institutions, the implementation of development cooperation between regions is not yet optimal.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan dan melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri rumah tangganya pemerintahannya.

Hal ini terlihat adanya adanya perlimpahan kewenangan tersebut tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui perundang- undangan tersebut diberikan suatu cara yang baru di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah . kewenangan dan tanggung jawab tersebut diharapkan bisa memberikan suatu dorongan dan inovasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya daerah masing-masing.

Otonomi daerah didefinisikan sebagai semangat di dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang mandiri, baik secara politik maupun mandiri dalam hal keuangan. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan dengan harapan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya., dan memiliki semangat yang besar dan daya saing dengan daerah lain dalam hal pembangunan daerah.

B. LITERATUR REVIEW

Konsep Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan merupakan suatu patokan buat memudahkan tercapainya sesuatu tujuan, membuat strategi buat menggapai tujuan itu, serta meningkatkan rencana kegiatan kerja organisasi. Bagi Alder serta Rustiadi(2008: 339) melaporkan kalau perencanaan merupakan,” Sesuatu proses memastikan apa yang mau dicapai pada waktu yang hendak tiba dan menetapkan tahapan- tahapan yang diperlukan buat mencapainya”. Perencanaan merupakan sesuatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, dan memastikan strategi yang hendak digunakan buat menggapai tujuan organisasi. Perencanaan ialah prosesproses yang berarti dari seluruh guna manajemen karena tanpa perencanaan(Planning) guna pengorganisasian, pengontrolan ataupun pengarahan tidak hendak berjalan.

Perencanaan dalam makna seluas- luasnya merupakan sesuatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan- kegiatan yang hendak dilaksanakan buat menggapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan sesuatu metode gimana menggapai tujuan sebaik- baiknya(maximum output) dengan

sumber- sumber yang terdapat supaya lebih afisien serta efisien. Perencanaan merupakan penentuan tujuan yang hendak dicapai dicoba, gimana, bilamana, serta oleh siapa. Albert waterston mengatakan perencanaan merupakan memandang kedepan dengan mengambil opsi bermacam alternatif dari aktivitas buat menggapai tujuan masa depan tersebut dengan terus menjajaki supaya biar penerapannya tidak menyimpang dari tujuan.

2. Pengertian Pembangunan

Berikut sebagian pengertian pembangunan menurut para pakar:

Todaro: Pembangunan dipecah dalam 3 komponen bawah, selaku basis konseptual serta pedoman instan dalam menguasai pembangunan yang sangat hakiki ialah kecukupan yang penuh kebutuhan pokok, tingkatkan rasa harga diri ataupun jati diri dan kebebasan dalam memilah. Berikutnya, Todaro mengemukakan kalau pembangunan merupakan sesuatu proses multidimensional yang mencakup bermacam perihal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap warga, serta institusi nasional, disamping senantiasa mengejar akselerasi perkembangan ekonomi, penindakan ketimpangan pemasukan, pengentasan kemiskinan.

Ginjar kartasmista: Pembangunan merupakan sesuatu proses pergantian kearah yang lebih baik lewat upaya yang dicoba secara terencana.

Siagian: Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan perkembangan serta pergantian secara terencana serta sadar yang ditempuh oleh sesuatu negeri ataupun bangsa yang mengarah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa(nation building).

Deddy T. Tikson: Pembangunan ialah transformasi ekonomi, strategi serta budaya yang secara terencana lewat kebijakan serta pula strategi mengarah kearah yang diidamkan.

Surkino: Pembangunan merupakan sesuatu usaha proses yang menimbulkan pandangan perkapita warga bisa bertambah dalam jangka panjang. Jadi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan perkembangan serta pergantian kearah yang lebih baik lewat upaya yang dicoba secara terencana dengan memakai sumberdaya buat menggapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan hendak jadi bahan pedoman ataupun acuan bawah untuk penerapan pembangunan(action plan). Oleh sebab itu, perencanaan pembagunan sebaiknya bertabiat implementatif(bisa dilaksanakan) serta aplikatif(bisa diterapkan) Ada banyak penafsiran perencanaan pembangunan bagi para pakar serta bagi undang- undang Nomor. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Riyadi serta Bratakusumah: perencanaan pembangunan merupakan sesuatu proses prumusan alternatif- alternatif ataupun keputusan-keputusan yang didasarkan pada data- data serta fakta- fakta yang hendak digunakan selaku bahan buat melakukan sesuatu rangkaian aktivitas/ kegiatan.

Conyers serta Hills: Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan- keputusan ataupun pilihan- pilihan bermacam alternatif pemakaian sumberdaya buat menggapai tujuan- tujuan tertentupada masa yang hendak tiba.

Arthur W. Lewis: perencanaan pembangunan ialah sesuatu kumpulan kebijaksanaan serta program pembangunan buat mendesak warga serta swasta buat memakai sumberdaya yang ada secara lebih produktif.

Meter. L. Jhingan: Perencanaan pembangunan pada dasarnya ialah pengendalian serta pengaturan perekonomian dengan terencana oleh sesuatu penguasa asi serta pendanaan yang bertabiat indikatif. RKP ialah pedoman untuk penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri(APBN).

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut undang-Undang No. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan buat mengendalikan sendiri kepentingan warga ataupun kepentingan buat membuat ketentuan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi wilayah berasal dari kata otonomi serta wilayah.

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos serta namos. Autos berarti sendiri serta namos berarti ketentuan ataupun undang- undang, otonomi

bermakna membuat perundang-undangan sendiri tetapi dalam perkembangannya, konsepsi otonomi wilayah tidak hanya memiliki makna *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), pula utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Sehingga otonomi bisa dimaksud selaku kewenangan buat mengendalikan sendiri ataupun kewenangan buat membuat ketentuan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sebaliknya wilayah merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batas-batas daerah.

Penerapan otonomi wilayah tidak hanya berlandaskan pada acuan hukum, pula selaku implementasi tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan metode membagikan wilayah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata serta bertanggung jawab, paling utama dalam mengendalikan, menggunakan serta menggali sumber-sumber kemampuan yang terdapat di wilayah tiap-tiap.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan keadaan atau masalah yang akan diamati di lapangan. Menurut Sugiyono (2007) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di dalamnya peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data yang relevan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut.

D. HASIL DAN DISKUSI

Sejak dibentuk tahun 2002, Kabupaten Pulang Pisau terus melakukan pembangunan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pulang Pisau 2006-2025. Dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten periode 2013-2018 disusun. Visinya adalah: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera. Untuk bisa mencapai visi tersebut, ada tujuh misi RPJMD yang harus dilakukan, yaitu:

1. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan pemukiman.

2. Peningkatan sumber daya manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dari agrobisnis menjadi agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel.
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

Lintas sektor untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan berkelanjutan dari empat sektor lainnya, diperlukan sejumlah langkah yang sifatnya lintas sektoral. Pertumbuhan ekonomi hijau butuh Investasi pihak swasta dimana tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis atraktif. Konflik sosial harus dihindari agar sektor swasta aman berinvestasi. Untuk itu, dibutuhkan intervensi untuk memperbaiki sistem perijinan di semua sektor. Selain itu, modal alam kabupaten juga harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan lingkungan bisa dicapai. Pengkajian kawasan bernilai konservasi tinggi dan integrasi kajian lingkungan hidup strategis ke dalam rencana tata ruang kabupaten adalah dua upaya yang bisa membantu pelaksanaan intervensi tersebut

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Kabupaten Pulang Pisau memiliki 4 sektor pertumbuhan ekonomi hijau antara lain sebagai berikut:

1. Kehutanan

Revitalisasi sektor kehutanan di Kabupaten Pulang Pisau membutuhkan upaya terkoordinasi untuk mengatasi dampak dari praktek penebangan yang tidak berkelanjutan di masa lalu. Ketidakjelasan status kawasan dan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal menjadi dua tantangan utama bagi upaya perbaikan pengelolaan lahan. Jika tantangan ini bisa

diatasi, maka manfaat dari hutan dan regenerasi alami lahan gambut bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Artinya, kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa diseimbangkan. Untuk mencapainya, dua intervensi diusulkan, yaitu: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Pulang Pisau, dan fasilitasi pembangunan hutan serta pengelolaan lahan gambut yang berbasis masyarakat.

2. Perikanan budidaya

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap bahwa sektor perikanan akan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, sektor ini menjadi prioritas untuk menjamin ketahanan pangan, baik di provinsi dan kabupaten. Namun, di wilayah pesisir, konversi hutan mangrove menjadi tambak menyebabkan dampak serius bagi lingkungan, dan akhirnya malah merusak keberlanjutan pembangunan kabupaten. Agar kebutuhan untuk pembangunan perikanan budidaya dan pelestarian hutan mangrove bisa dicapai, maka diusulkan tiga intervensi, yaitu pengembangan sistem *silvofishery* di hutan mangrove, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perikanan yang berkelanjutan, dan pengembangan praktek pengelolaan yang baik atau *Best Management Practices (BMP)* untuk komoditas perikanan budidaya.

3. Perkebunan

Di Kabupaten Pulang Pisau, pertanian yang dikelola langsung oleh masyarakat menempati posisi penting dalam pembangunan ekonomi. Potensinya masih bisa ditingkatkan, melalui intensifikasi, BMP, dan perbaikan rantai pasokan komoditas. Untuk itu, strategi ini mengusulkan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat untuk komoditas karet, kelapa dan kopi. Seiring dengan meningkatnya permintaan minyak sawit yang diproduksi dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan, maka pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit dikembangkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan daerah provinsi tentang pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam strategi ini, diusulkan upaya perluasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan, menghindari gambut dalam dan menargetkan kawasan bernilai konservasi rendah, misalnya lahan kritis.

4. Energi terbarukan

Sektor energi di Kabupaten Pulang Pisau saat ini sebagian besar dipasok dari luar wilayah. Terbatasnya akses terhadap energi bagi masyarakat di wilayah terpencil telah membatasi peluang mereka untuk membangun perekonomiannya sendiri. Karena itu, strategi ini mengusulkan dua intervensi yang sifatnya paralel, yaitu: penyediaan listrik dari biogas limbah pabrik sawit, dan penyediaan energi bersih dari biogas limbah ternak. Proses pengikatan gas metan dari produksi biogas bermanfaat untuk ekonomi dan lingkungan, meliputi pengurangan biaya untuk penyediaan energi di tingkat rumah tangga, penurunan emisi gas rumah kaca, dan penyediaan energi terbarukan yang efisien, baik di tingkat rumah tangga maupun bisnis.

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah; dan sinkronisasi proses proses.
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai.
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pembangunan; pengembangan untuk melaksanakan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang.
9. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh

Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;

10. Belum Optimalnya Implementasi Kerjasama pembangunan antar daerah. Anggaran Pemerintah Kabupaten

Di Indonesia, proses penganggaran pemerintah sudah terintegrasi dengan mekanisme perencanaan pembangunan. Bila strategi ini akan didanai dari sumber keuangan negara, maka strategi ini harus dimuat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten menerima pendapatan dari berbagai sumber, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti dijelaskan di dalam Lampiran 2. Ada beberapa pilihan untuk mengarusutamakan kegiatan-kegiatan di strategi ini ke dalam rencanapembangunan kabupaten:

1. Melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan. Pemerintah secara rutin menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan prioritas kebutuhan pembangunan. Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat, di desa biasanya dilaksanakan pada Bulan Januari, kecamatan di Bulan Februari, dan kabupaten di Bulan Maret. Proses bottom-up ini, terutama di desa dan kecamatan, menyediakan peluang dimana strategi ini bisa langsung dikomunikasikan dan dinilai prioritasnya bersama masyarakat. Lalu, di saat yang sama, juga dilakukan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat kabupaten yang hasilnya akan diintegrasikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dalam Musrenbang kabupaten. Hasil keseluruhan proses ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Melalui mekanisme perubahan anggaran
Pemerintah secara rutin terus memantau kinerja SKPD berdasarkan realisasi rencana dan penggunaan anggaran melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal). Di pertengahan tahun, hasilnya bisa digunakan pemerintah untuk melakukan koreksi atas target capaian dan anggaran. Proses ini menyediakan peluang, bila strategi ini bisa

didiskusikan untuk masuk menjadi komponen perubahan dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah. Hanya saja, mengingat waktunya pelaksanaannya yang sempit, hanya kegiatan penguatan kapasitas dan pengadaan saja yang mungkin bisa dimasukkan.

3. Diadaptasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD.

Bila pemerintah kabupaten akan membuat RPJMD di masa pemerintahan berikutnya, strategi ini bisa dipadukan dengan prioritas pembangunan kabupaten. Bab yang mengulas tentang visi pertumbuhan ekonomi hijau dan dasar pemikiran dari setiap sektor terpilih, bisa dimuat sebagai bagian dari isu- isu strategis di RPJMD, karena menjelaskan bentuk-bentuk tantangan yang harus dihadapi pemerintah kabupaten ke depan. Kerangka berpikir logis di lampiran 1 strategi ini bisa digunakan Pemerintah untuk memantau kinerja pembangunan ekonomi kabupaten menuju pertumbuhan ekonomi hijau. Lalu, intervensi dan kegiatan di strategi ini bisa dimasukkan sebagai prioritas program RPJMD yang akan dianggarkan untuk pelaksanaannya. Jika sudah terintegrasi dengan RPJMD.

E. KESIMPULAN

Pembangunan merupakan sesuatu proses multidimensional yang mencakup bermacam perihal yang mendasar atas struktur sosial sikap- sikap warga, serta institusi nasional, disamping senantiasa mengejar akselerasi perkembangan ekonomi, penindakan ketimpangan pemasukan, pengentasan kemiskinan. Jadi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan perkembangan serta pergantian kearah yang lebih baik lewat upaya yang dicoba secara terencana dengan memakai sumberdaya buat menggapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Perencanaan pembangunan hendak jadi bahan pedoman ataupun acuan bawah untuk penerapan pembangunan. Oleh sebab itu, perencanaan pembagunan sebaiknya bertabiat implementatif serta aplikatif Ada banyak penafsiran perencanaan pembangunan bagi para pakar serta bagi undang- undang Nomor. RKPialah pedoman untuk penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri.

Wilayah merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batas- batas daerah. Penerapan otonomi wilayah tidak hanya berlandaskan pada acuan hukum, pula selaku implementasi tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan metode membagikan wilayah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata serta bertanggung jawab, paling utama dalam mengendalikan, menggunakan serta menggali sumber-sumber kemampuan yang terdapat di setiap wilayah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Taufik. Z. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan. QE Jurnal. Vol. 02, No. 01-33.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik. 2015. Temanggung dalam angka 2015. Temanggung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Jawa Tengah dalam angka 2015. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik.
- Bafrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Basuki, Agus Tri dan Gayatri, Utari. 2009. Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 10. No. 1. Hal : 34-50.
- Boediono. 2007. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. Dault, dkk. 2009. Analisis Kontribusi Sektor Perikanan pada Struktur Perekonomian Jawa Tengah. Jurnal Saintek Perikanan. Vol. 5. No. 1. Hal: 15-24.
- Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018.
- Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda)(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitati